



RELASI PARIWISATA, BUDAYA, DAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

Muhammad Ali Azhar

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

e-mail: aliazhar23mr@yahoo.co.id

Abstrak

Sejak Bali dibuka sebagai destinasi wisata dunia yang sangat populer, Bali telah menjelma menjadi kawasan wisata dunia yang sangat menarik dikunjungi wisatawan baik manca maupun wis man. Di Bali pariwisata tidak ubahnya bak generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Sumbangsihnya dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Bali tidak terbantahkan lagi. Akan tetapi, tidak dipungkiri kehadiran pariwisata di Bali telah menimbulkan suasana yang paradoks. Disatu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya telah meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Bali, akan tetapi di sisi lain munculnya pariwisata telah menunjukkan kehancuran budaya dan perilaku dan jati diri manusia Bali yang tidak bisa dihindarkan. Paradoks ini diperparah dengan hadirnya rezim yang memerintah baik dari pusat maupun di daerah. Terjadinya ledakan bom yang berskala besar yang terjadi pada tahun 12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005 sempat memunculkan kekhawatiran akan terjadinya praktek “ajeg Bali”. Kekhawatiran akan kembali bangkitnya politik identitas jelas akan mengancam pola relasi keseimbangan antara adat, dan agama. Munculnya identitas politik “ajeg Bali” ini bisa berpotensi mengancam keragaman identitas (agama, etnis, budaya). Kekhawatiran ini cukup beralasan karena praktek ini sebelumnya sudah berkembang dalam masyarakat Bali. Beruntung di kalangan masyarakat Bali pada lapisan elit/strata atas tidak mempermasalahkan aksi kekerasan itu. Masyarakat Bali dapat menahan diri dengan tidak melakukan tindakan aksi ‘balas dendam’ atau kekerasan, tetapi justru menempuh pendekatan spritual yang secara simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan dan toleransi yang menembus batas-batas ras, negara, etnik, agama, dan telah mendapatkan empati dan simpati masyarakat lokal, nasional dan dunia.

Kata kunci: Pariwisata, Budaya, dan Masyarakat Bali

Abstract

Since Bali was opened as a world tourism destination that is very popular, Bali has transformed into a world tourism area that is very interesting visited by foreign tourists and foreign tourists. In Bali tourism is like a generator driving the economic development of Balinese people. His contribution in encouraging the economic development of Balinese society is undeniable. However, it is undeniable that tourism in Bali has created a paradoxical atmosphere. On the one hand tourism with all its dynamics has increased prosperity for the people of Bali, but on the other hand the emergence of tourism has shown the destruction of culture and behavior and identity of human Bali that can not be avoided. This paradox is exacerbated by the presence of regimes that govern both from the center and in the regions. The occurrence of a large-scale bomb explosion that occurred on October 12, 2002 and October 1, 2005 had raised fears of a "steady Bali" practice. Concern over the revival of identity politics will obviously threaten the pattern of a balance of relations between adat and religion. The emergence of a "Balinese Bali" political identity can potentially threaten the diversity of identities (religion, ethnicity, culture). This concern is quite reasonable because this practice had previously developed in Balinese society. Luckily among Balinese people, the elite / strata layer does not question the violence. Balinese people can refrain from acts of 'revenge' or violence, but instead take a spiritual approach symbolically containing messages of peace, unity and tolerance that penetrate the boundaries of race, state, ethnicity, religion and have gained empathy and the sympathy of local, national and world community.

Keywords: Tourism, Culture and Balinese Society



I. PENDAHULUAN

Studi-studi tentang Bali (Robinson, 1995, Vikcers, 1997), memperlihatkan Bali merupakan hasil sebuah konstruksi sosial yang panjang, dilakukan oleh rezim yang memerintah dan seringkali tidak konsisten dalam menjalankan urusan kebijakannya. Penyebab dari semua itu adalah sifat pulau Bali yang identik dengan potensi pengembangan industri pariwisata dan mengundang banyak pihak berkompetisi untuk meraup keuntungan dari industri pariwisata.

Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada usaha Belanda memisahkan Bali dengan saudara-saudaranya yang lain di Indonesia, seperti pengaruh Jawa dan Islam. Pengisolasian ini merupakan usaha pemerintah Hindia-Belanda untuk tetap mempertahankan Bali dengan keunikan budayanya. Tentu, demi kepentingan ekonomis. Karena dalam sejarahnya, Belanda-lah yang pertama kali memperkenalkan Bali ke dunia luar, terkait keeksotikan pulau tersebut yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata dari Eropa¹.

Setelah berakhirnya masa kolonial Belanda, berakhir pula masa pengisolasian, dan Bali menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Memasuki masa pemerintahan orde baru, karena potensinya yang luar biasa dibidang pariwisata, Bali ditetapkan sebagai daerah tujuan pariwisata sampai kemudian menimbulkan korban-korban rezim pariwisata dengan gemerincing dollarnya.

Bali sudah sejak lama dilukiskan sebagai cagar budaya yang terus menerus dipelihara. Salah satu keunikan dari cagar budaya itu adalah adat-istiadatnya yang hingga kini masih terwarisi. Tidak disadari adat istiadat yang juga merupakan peliharaan yang terjadi pada masa kolonial Belanda semacam pendisiplinan, pembentuk rezim ketertiban dan keteraturan di Bali. Genealogi adat ini terus dipelihara sampai era orde baru, sehingga Bali disanjung-sanjung sebagai potensi pembangunan pariwisata Budaya. Pelukisan ini merupakan produk dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah (masa Orde Baru) waktu itu (Ngurah Suryawan; 2009).

Seiring dengan perjalanan waktu. Dewasa ini, pulau ini sedang menghadapi tantangan berat, bersamaan berubahnya panorama ekonomi-politik, sosial-agama (budaya). Di sisi lain Pulau ini membutuhkan dunia luar (wisatawan, modal, dan tenaga kerja murah). Hal itu ditandai dengan mengalirnya arus imigrasi dari luar Bali. Namun di sisi lain dengan kehadiran pengaruh dari dunia luar tersebut, rakyatnya merasa terancam oleh kekuatan luar (investor besar, dekadensi barat, dan Islam). Henk Schult Nordholt (1995), mencirikan Bali sebagai benteng terbuka yang menerima pengaruh luar seraya berjuang melindungi diri darinya².

Melihat Bali dalam konteks ke-Indonesiaan dewasa ini tentu tidak lepas dari perkembangan industri pariwisata dengan faktor sosio-budaya yang dimiliki masyarakat Bali. Berbagai perkembangan yang mendukung ketiga faktor tersebut telah diperlihatkan sebagaimana

¹ Pengembangan pariwisata Bali secara melembaga ditandai dengan mulai aktifnya perusahaan pelayaran Belanda, KPM (*Koninklijk Paketvarrt Maatschupij*) pada awal 1920-an yang mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata.

² Henk Schulte Nordholt, (2010), *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*, Denpasar; Pustaka Larasan



terangkum kedalam aspek pariwisata, budaya, dan agama berikut ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pariwisata

Sejak dibukanya kran Bali sebagai daerah destinasi pariwisata, banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi di pulau mungil ini. Kebijakan yang dibuka sejak pemerintahan Orde baru ini, telah berhasil mengubah wajah pulau ini menjadi lebih menarik dan memiliki daya tarik buat wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (manca negara).

Pariwisata Bali yang tumbuh dan berkembang seperti saat ini tidaklah mudah dicapai dengan mudah dan cepat. Sejarah perkembangan pariwisata Bali diawali dengan ketertarikan masyarakat internasional terhadap budaya Bali, merupakan sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut dengan berbagai kendala dengan permasalahannya.

Selanjutnya pariwisata Bali mulai dilakukan secara terencana yaitu dengan disusunnya *master plan* pariwisata Bali oleh SCETO (*baca; buku panduan THK Foundation*), pada tahun 1971 yang menetapkan tiga kawasan wisata yaitu, Kuta, Sanur dan Nusa Dua. SCETO merekomendasikan bahwa Bali memerlukan *Tourist Resort* yang terpisah dari masyarakat, tanah yang tidak produktif dan memiliki aksesibilitas. Untuk saat itu daerah yang paling cocok dikembangkan dan

memenuhi kriteria yang diajukan SCETO adalah Nusa Dua³.

Tahun 1980-an merupakan masa keemasan pariwisata Bali. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sangat seimbang dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali (*supply and Demand*) sangat berimbang. Sehingga tingkat hunian hotel saat itu sangat tinggi. Hasil pariwisata juga banyak dinikmati oleh banyak pihak. Pada masa-masa ini prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan sudah diterapkan dalam pembangunan pariwisata di Bali.

Tidak mengherankan lagi, bila di Bali dewasa ini pariwisata telah menjadi semacam “ideologi” baru bagi manusia Bali. Artinya pariwisata adalah bagian integral dari kebudayaan Bali. Anggapan ini seperti yang dijelaskan pengalaman seorang penelitian Philip Frick McKean (1973) yang menangkap hal ini sebagai suatu *partial equivalent structure* (struktur kesepadanan parsial). Artinya adalah, pada peristiwa pariwisata di Bali, masyarakat Bali memberikan layanan wisata (*baca: kesenian, panorama alam Bali*) sembari pada saat yang sama, si Wisatawan memberikan kepuasan ekonomi (*baca;uang*) kepada tuan rumah.

Kelebihan seperti ini, disadari penuh oleh pemerintah daerah beserta stakeholdernya untuk memusatkan perhatiannya kepada pembangunan pariwisata sebagaimana kita menyaksikan Bali dewasa ini sebagai tujuan pariwisata berkelas dunia.

³M Baiquni dkk, (2010). *Pariwisata Berkelanjutan dalam pusaran Krisis Global* Denpasar; Udayana University press.



1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Liberalisasi Pariwisata

Sebagai ikon dan figurasi pariwisata Indonesia, Bali telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata tidak ubahnya bak generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Sumbangsihnya dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Bali tidak terbantahkan lagi. Dari berbagai pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak salah jika pada akhirnya pemerintah provinsi sebagai pemegang otoritas dan legitimasi beserta seluruh *stakeholdernya* yang berinteraksi langsung di tataran implementatif mulai mengulirkan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan demi menjaga konsistensi dan kontinuitas peran dan kontribusinya di Bali.

Struktur logika diatas, tentu berdasarkan pula pada keindahan alam dan kebudayaan Bali yang unik dan beranekaragam serta berfalsafah Hindu. Seperti diketahui, pembangunan pariwisata di Bali selalu berlandaskan konsep “Tri Hita karana” (baca; buku panduan THK Foundation). Konsep ini berekspektasi untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Pemerintah daerah (Pemprov. Bali) telah menetapkan peraturan daerah atau perda no. 3 tahun 1974 tentang pariwisata budaya sebagai acuan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif. Perda tersebut dalam perjalannya kemudian diperbaharui menjadi perda nomor 3 tahun 1991 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali adalah pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata diharapkan dapat berjalan secara selaras, serasi dan harmonis dengan kebudayaan setempat dan berakar pada nilai-nilai luhur agama Hindu.⁴

Berikut ini sederet kebijakan yang menyangkut konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali :

1. Perda Tk. I Bali nomor 3 tahun 1974 *juncto* Perda Tk.I Bali nomor 3 Tahun 1991 tentang pariwisata budaya
2. Perda prov. Bali Nomor 3 Tahun 205 tentang RTRW Provinsi Bali yang didalamnya diatur tentang penetapan 15 kawasanpariwisata
3. Perda Prov. Bali nomor 4 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Perda prov. Bali nomor 5 Tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur Bangunan Gedung
5. Perda Prov. Bali Nomor 7 tahun 2007 tentang Usah Penyediaan sarana Wisata Tirta

⁴ . IGN Parikesit Widiatjeja, (2011). Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; konstruksi, konsep ragam masalah dan Alternatif solusi, Denpasar; Udayana University Press.



6. Perda Prov. Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata.

Berdasarkan serangkaian perda diatas, pengembangan pariwisata merupakan suatu proses secara terukur dan terencana yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Untuk itulah dibutuhkan suatu instrumen kebijakan yang efektif, transparan, terperinci dan terpadu sehingga pengejawantahan prinsip *good governance* yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Diskursus pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan mengambil latar pariwisata Bali menjadi suatu model pembelajaran. Pariwisata yang selama ini dianggap sebagai pembawa kesejahteraan dan nama besar bagi Bali. Pariwisata yang kepadanya segala harapan masa depan tiga setengah juta masyarakat Bali ditumpukan. Pariwisata yang belakangan diketahui juga membawa dampak negatif yang tidak kecil; degradasi lingkungan, hilangnya ruang-ruang publik, pudarnya identitas dan kejatidirian manusia Bali, ketimpangan kemakmuran antar wilayah, disharmoni sosial, dan seterusnya.

Perkembangan pariwisata Bali telah menciptakan kesenjangan kesejahteraan ekonomi, baik antar wilayah maupun antar strata

masyarakat. Dibalik daya pesona manfaat ekonomi yang dihasilkannya, pariwisata Bali juga menghasilkan dampak negatif dalam berbagai dimensi. Disatu sisi memang telah terjadi lompatan kemakmuran yang dialami oleh sebagian kecil masyarakat Bali yang menempati puncak piramida, yang berhasil memanfaatkan peluang yang dihadirkan gemuruh turisme.

Pada sisi yang diametral di pasar piramida tersebut, ratusan ribu masyarakat marginal masih berkuat menjalankan hidupnya dibawah garis kemiskinan. Mereka adalah pengrajin kecil, petani penggarap, buruh, pedagang kecil, nelayan, pengangguran, korban PHK, dan sebagainya. Ironisnya, kelompok-kelompok masyarakat marginal tidak hanya mendiami desa-desa miskin di pelosok-pelosok Bali tetapi juga ada di desa-desa di sekitar kawasan pariwisata. Beberapa persoalan tersebut, saling berkelindan menjadi penghambat perkembangan kepariwisataan Bali.

Melihat persoalan diatas, maka diperlukan bentuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Istilah berkelanjutan dalam hal ini meliputi keberlanjutan dalam bidang sosial budaya berkelanjutan lingkungannya maupun berkelanjutan secara ekonomi. Pariwisata budaya yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* harus tetap menjadi payung bagi pengembangan pariwisata Bali.

Dalam filosofi ini, tersurat tanggung jawab pihak pengelola pariwisata agar pelaksanaan pembangunan pariwisata yang ada



di wilayah provinsi Bali berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola wilayah yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

3. Pembangunan Kawasan Wisata bercorak Modern

Di Bali pengembangan model kawasan pariwisata yang bercorak modern sebagaimana terlihat di wilayah Nusa Dua. Nusa Dua adalah suatu kawasan yang tidak asing ditelinga bagi para wisman baik luar maupun dalam negeri.

Pengembangan wisata di wilayah ini merupakan model pengembangan pariwisata wisata terpadu. Sebagaimana disebutkan diatas, Nusa Dua merupakan tempat yang terletak di Bali selatan, salah satu kawasan yang memperlihatkan keindahan pantai yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Posisinya yang strategis mendukung untuk dikembangkan menjadi kawasan industri pariwisata.

Nusa dua berkembang melalui proses perencanaan kawasan yang idealis. Perencanaan awal yang mengandung keinginan mendalam untuk mensejahterakan masyarakat lokal di kawasan itu, dan realitas dalam pelaksanaan pembangunan kawasan yang penuh dengan kekuatan hegemonik⁵.

Dampak positif yang diharapkan dengan pembangunan

kawasan Nusa Dua adalah dimungkinkannya masyarakat dengan cepat dapat berkomunikasi dan dihubungkan dengan berbagai aktifitas yang ada diluar kawasan. Peluang untuk membuka usaha kecil-kecilan juga diharapkan terbuka bagi masyarakat karena tersedianya berbagai fasilitas sebagai bagian dari pembangunan kawasan integral.

Tidak dapat dipungkiri kemashuran serta keindahan pantai kawasan pariwisata Nusa Dua dengan berbagai penghargaan yang telah diterima, tidak dapat dilepaskan dan terwujudnya dari pengorbanan yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal yang berada dikawasan tersebut.

Masyarakat yang memiliki lahan tidak sedikit mengalami tekanan. Pada saat itu, ada satu pilihan, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju lahan harus dilepaskan dengan perhitungan ganti rugi saat itu.

Ada bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh para penguasa, untuk menutup keran informasi, sehingga keputusan-keputusan bersifat hegemonik mudah dilakukan. Dalam tekanan situasi yang sedemikian rupa, ditambah lagi dengan tidak adanya informasi yang akurat mengenai harga tanah dan lain-lain, sifat lugu masyarakat yang cepat menyerah dan selalu pasrah menerima keputusan dari atas, menyebabkan masyarakat lokal bersedia menyerahkan lahannya dibawah berbagai tekanan dan keputusan yang hegemonik pada saat itu.

⁵ I Nyoman Madiun, (2010). *Nusa dua model Pengembangan kawasan wisata Moder*, Denpasar; Udayana university press.



Kepasrahan masyarakat ini kemudian dibalas oleh pemerintah daerah dengan senantiasa bertindak hati-hati dan melakukan analisis kelayakan untuk menjamin adanya kepastian bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan sungguh-sungguh berorientasi lingkungan dan secara ekonomi layak untuk dikembangkan.

Singkatnya dalam pembangunan model pariwisata yang berjalan di Nusa Dua, menjelaskan dua sisi yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah waktu itu, yang berujung pada kesukarelaan masyarakat terhadap rencana pemerintah membangun Nusa Dua sebagai kawasan industri pariwisata, yang pada akhirnya masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Hasilnya, berkat dukungan dan partisipasi masyarakat lokal dan kuatnya peran manajemen pemerintah daerah, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata modern yang dikenal baik di mancanegara.

B. Budaya

Keindahan Pulau Bali ternyata tidak saja dari segi panorama alamnya, akan tetapi terpancar pula dalam budaya masyarakatnya yang unik. Sejak itu, Bali terkenal dengan berbagai julukan yang menggambarkan kesejukan alam dan kedamaian masyarakatnya.

Puja dan puji pun datang silih berganti dari berbagai kalangan intelektual dan maupun tokoh dunia. Penulis Amerika, Hickman Powell

(1930) pernah menyebut Bali sebagai : *The Last Paradise*”, Perdana Menteri India Pandit Jawahral Nehru, pada waktu kunjungannya pertama kali memberi julukan Bali sebagai *“The Morning of the World”* (Vicker, 1996;5).

Masyarakat Bali hidup dalam struktur masyarakat berkelas homogen yang disatukan oleh sistem kepercayaan (baca;Hindu) sebagai agama mayoritas di pulau ini. Dari keadaan seperti ini menciptakan produk budaya yang sama sekali unik dan menarik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Budaya orang Bali adalah budaya yang bernafaskan agama Hindu. Demikian menurut penuturan orang Bali. Dalam beberapa kesempatan orang Bali menyebut budayanya dengan istilah roh Hindu, artinya semua yang ada di Bali saat ini adalah Roh Hindu, roh yang sesungguhnya pemujaan terhadap leluhur.

Dalam hubungan ini, budaya dan tradisi Hindu mempengaruhi cara berpikir orang Bali, sehingga terbangun konsep, budaya pikir (gagasan) yang mempengaruhi cara hidup. Dari situ muncul konsep-konsep budaya; *tri hita karana*, *rwa bhineda*, *karma pala*, *menyama braya*, *gilik saguluk*, *desa kala patra*, *hulu-teben*, dan lain-lain. Konsep kedwiragaman atau *rwa bhineda*, *hulu-teben* memberikan gambaran, pengertian tentang adanya pembagian atas dua (hulu-hilir, atas-bawah, utara-selatan) yang keduanya membangun keseimbangan dalam kehidupan. Hal itu membawa pengaruh kepada sikap membangun tempat tinggal suci dan dimana untuk



perumahan biasa. Kemudian konsep *karma pala*, memberikan tuntunan agar manusia bersikap dan berbuat jujur dalam masyarakat. Konsep *menyama braya*, memberi dorongan agar masyarakat dapat hidup saling membantu, tolong menolong dalam berbagai kegiatan⁶.

Konsep-konsep di atas, menciptakan budaya Bali yang berprinsip. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam *kasukertan* dalam kebersamaan. Beberapa dari prinsip ini antara lain; kebersamaan (*sareng-sareng*) atau dikenal dengan istilah “santun”, kesepakatan (*rarem/pararem, sabha, parum, sangkep*) atau sering disebut “santa”, dan kedamaian atau “santi”. Istilah yang terakhir ini sering diucapkan sebagai salamnya orang Hindu/Bali dalam kehidupan beragama⁷.

Secara universal (*kauripan*) budaya Bali yang dipraktikkan sebagai adat termanifestasi dalam kesantunan bersama dalam kehidupan yang saling memuliakan hidup dan kehidupan bersama untuk keberlangsungan kehidupan bersama, baik yang tampak mata (*sakala*) maupun yang tidak tampak oleh mata (*nisakala*), baik yang biotik maupun abiotik.

Di Bali banyak terdapat istilah kearifan lokal. Kearifan lokal ini menciptakan sebuah produk budaya yang unik, sehingga Bali yang dewasa ini kerap dijuluki sebagai destinasi pariwisata dunia yang

dipamerkan bukan hanya keunikan panorama alamnya akan tetapi budayanya ikut dipromosikan lewat model pembangunan wisatanya. Sehingga dewasa ini di Bali dikenal istilah pariwisata budaya, bukan budaya pariwisata. Beberapa istilah produk kearifan lokal tersebut sebagaimana berikut ini;

1. Tri Hita Karana

Kebudayaan menunjukkan identitas penganut/pendukungnya. Demikian kebudayaan menurut orang Bali. Kebudayaan Bali merupakan identitas suku bangsa atau etnis Bali, terutama etnis Bali yang beragama Hindu (etnis Bali-Hindu) dan orang-orang yang telah disahkan sebagai pemeluk agama Hindu. Kebudayaan Bali yang dimaksud adalah kebudayaan yang berlandaskan *Tri Hita Karana* (*THK*) dan berjiwakan agama Hindu.

THK adalah ajaran Hindu yang universal, terdiri dari tiga komponen yaitu; *parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya atau *Ida Sanghyang Widhi Wasa* termasuk leluhur, *Pawongan* (hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya), *Pawongan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alamnya⁸).

Oleh karena kebudayaan Bali berjiwakan agama Hindu maka hubungan harmonis yang terimplikasi dalam komponen

⁶ I Gde Parimarta, (2011). *Nilai Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat Bali*, Denpasar; Kementerian kebudayaan dan pariwisata RI dan Udayana University press.

⁷ I Ketut Sumarta dalam sebuah Makalah, (2012). Santun Berinvestasi di Wilayah Desa Pakraman Bali, Tidak dipublikasikan.

⁸ I Nyoman Suarsana, (2011). Pustaka; jurnal Jurnal Ilmu Budaya, Udayana University Press



Parhyangan, *Pawongan*, *Palemahan* berpedoman pada ajaran-ajaran agama Hindu. Realitas perilaku yang berpedoman pada ajaran-ajaran agama Hindu tercermin dalam diadakannya upacara keagamaan hampir pada setiap bidang kehidupan. Sementara realitas secara fisik tercermin dalam dimanfaatkannya berbagai macam sarana prasarana upacara seperti *banten*, *pelinggih*, dan peralatan lainnya.

Ajaran ini sarat dengan makna. Menurut ajaran ini jiwa manusia merupakan sesuatu yang menyebabkan hidup. Itu berarti bahwa kebudayaan Bali dapat hidup karena memiliki jiwa, yaitu agama Hindu. Oleh karenanya, diantara ketiga komponen *Tri Hita Karana* maka *Parhyangan* sebagai komponen yang berkaitan langsung dengan jiwanya kebudayaan Bali merupakan komponen sentral. Artinya, jika komponen *Parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan *ida sanghyang Widhi Wasa* termasuk *leluhur* sudah terwujud secara harmonis antara manusia dengansesamanya (*pawongan*) dan lingkungan alam (*palemahan*) akan terwujud, demikian sebaliknya. Pernyataan tersebut, mengimplikasikan asumsi bahwa semakin harmonis hubungan manusia dengan dunia *niskala* maka kehidupan pada dunia *sekala* akan semakin baik/bahagia.

Secara konseptual, cara untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya telah tercermin

dalam landasan kebudayaan Bali, yaitu *Tri Hita Karana*. *Tri* berarti tiga, *Hita* berarti Kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab. *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kebahagiaan. Ketiga penyebab kebahagiaan itu sekaligus merupakan komponen-komponen *THK*; *parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Ketiga komponen tersebut harus diimplementasikan sebagai satu kesatuan manunggal untuk mencapai kebahagiaan. Selanjutnya menurut Kaler (1994;88) mengungkapkan, bahwa ketiadaan salah satu komponen atau lepasnya salah satu komponen dari kemanunggalannya maka manusia tidak mungkin mencapai kebahagiaan dan duni pun akan musnah atau *pralaya*⁹.

Diantara ketiga komponen *THK* sebagaimana disebutkan diatas, komponen *parhyangan* merupakan komponen sentral. Dikatakan demikian karena jika komponen *parhyangan* sudah dapat diwujudkan secara ideal, maka komponen lainnya secara otomatis akan terwujud pula sesuai dengan konsepnya. Oleh karena itu, komponen *Parhyangan* sudah sepatutnya mendapat perhatian ekstra mendalam demi tercapainya kebahagiaan tentunya tanpa mengabaikan komponen lain (*pawongan* dan *Palemahan*).

2. Sua Bali; sebagai filsafat, konsep dan prinsip

Orang Bali banyak memiliki konsep kearifan lokal yang selaras

⁹ Ibid.



dan kontekstual. Orang Bali mempunyai filsafat hidup yang paling mendasar yang diatur dalam ‘keseimbangan’. Filsafat hidup ini bersumber dari konsep Tri Hita Karana, sebagai konsep keseimbangan dalam khasana ajaran Hindu yang mengitegrasikan secara selaras tiga komponen penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang diyakini dalam agama Hindu. Ketiga komponen tersebut, yaitu; pertama, *parhyangan* atau Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kehidupan; kedua, *palemahan* yaitu seluruh wilayah dari lembaga tersebut; ketiga, *pawongan* adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari semua lembaga yang bersangkutan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keharmonisan antara berbagai kepentingan individu dalam berinteraksi dan menjaga kondisi harmonis antara individu dan lingkungan alamnya¹⁰.

Sua Bali merupakan produk budaya yang diciptakan dalam menata kepariwisataan yang berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana*. Sua bali merupakan bentuk representasi dari keinginan masyarakat yang membangun pariwisata berbasis Tri Hita Karana dalam sebuah konsep kepariwisataan berskala kecil maupun besar.

Konsep ini memandang selama ini kepariwisataan Bali

memiliki tiga sisi yang merugikan; *pertama*, kekecewaan masyarakat Bali yang tidak begitu merasakan dampak positif secara ekonomis kepariwisataan. *Kedua*, munculnya dampak negatif pada lingkungan sosial. Lingkungan alam dan lingkungan budaya akibat dari pola kepariwisataan yang massal. Selain itu terjadi pula keterasingan budaya dalam masyarakat. *Ketiga*, kekecewaan wisatawan yang tidak menemukan lagi pemandangan alam dan budaya yang autentik, tetapi sebaliknya menemukan pemandangan buatan dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan.

Berangkat dari latar belakang diatas, prinsip ini berusaha mengimplementasikan gagasan *Tri Hita Karana*, tujuannya adalah untuk menghindarkan atau memperkecil dampak negatif sosio kultural kepariwisataan dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi penduduk.

3. Desa Pakraman

Tatanan sosial masyarakat Bali yang berbasis pada komunitas desa adat memiliki modal sosial yang kuat. Modal sosial ini tercermin dari adanya beragam pranata tradisional dalam masyarakat seperti *sekaa* (subak, clan, *sekaa manyi*, *sekaa kidung*, *sekaa gong* dan *sekaa teruna*)¹¹. Keberlangsungan dan keberlanjutan tatanan sosial

¹⁰ I Nyoman Sukma Arida, (2009). *Meretas Jalan Ekowisata Bali*; Proses Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali, Denpasar; Udayana University Press

¹¹ Nyoman Sukma Arida, (2012). *Pandora Bali: Refleksi di balik gemerlap turisme*, Denpasar; Pustaka Larasan.



masyarakat Bali ini hidup dan dihidupi berdasarkan landasan ajaran agama Hindu. Dalam tatanan praktis, ajaran Hindu tersebut terjabar dalam filosofi kearifan lokal seperti *paros-paros*, *salunglung sabayantaka*, *saharpanaya*, (kebersamaan, seja sekata dan sepenanggungan). Kearifan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan desa adat saat ini.

Pengertian desa di Bali masih bersifat mendua (dualisme)¹², yaitu; *pertama*, desa yang melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan, sehingga dikenal dengan istilah ‘desa dinas’ atau ‘desa administratif’. *Kedua*, desa pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat-istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *Kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *Kahyangan desa* (Pitana, 1994; Pasek Diantha, 2003; Parimatha, 2003; Windia, 2003).

Sebelumnya desa pakraman ini dikenal dalam istilah desa adat. Istilah desa Pakraman mulai dikenal sejak diundangkannya Perda tingkat I Bali nomor 6 Tahun 1986 tentang kedudukan fungsi dan peran desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

di propinsi daerah tingkat I Bali¹³. Setelah reformasi perda ini direvisi ke dalam perda provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang desa Pakraman. Kemunculan istilah ini sebenarnya ingin memperbaiki citra, mengembalikan peran dan fungsi desa yang hilang.

Dijelaskan dalam perda tersebut, bahwa yang disebut ‘desa Pakraman’ adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga*, (tiga buah pura, yaitu *puseh*, *Bale Agung dan Dalem*) mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tanganya sendiri (Pasal 1 huruf e Perda nomor 3/2001)¹⁴. Keistimewaan unsur-unsur diatas, sebagai perwujudan *Tri Murti* yang mencerminkan corak kehidupan yang membedakan dengan masyarakat-masyarakat hukum adat lainnya.

Desa Pakraman (DP) menurut peraturan daerah ini adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal-usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, bersumber kebudayaan Bali, berdasarkan *Tri Hita Karana*

¹² Jurnal Kajian Bali, Edisi April 2011. *Bali dalam Makro dan Mikro Politik*, Denpasar; Udayana University press

¹³ Tjok Istri Putra Astiti, (2010). *Desa Adat Menggugat dan Di Gugat*, Denpasar; udayana university press

¹⁴ Wayan P Windia, (2008). *Bali Mawacara ; keaatuan Awig-awig Hukum dan pemerintahan di Bali*, Denpasar; Udayana University press



mempunyai kahyangan tiga¹⁵. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa pakraman ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan *krama* desa.

Ini berarti bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat Hindu di Bali dipelihara dan dikembangkan oleh Desa Pakraman (DP) sebagai suatu lembaga tradisional yang berkarakter sosio-religius. Karakter sosio-religius ini dibentuk melalui penerimaan dan pembakuan nilai-nilai ajaran agama Hindu dalam kehidupan sosial dikalangan masyarakat adat di Bali.

Selanjutnya di dalam penjelasan umum perda tersebut (angka 5 dan 6) menyatakan; desa pakraman (DP) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan *krama*, prajuru desa bertanggungjawab kepada *parumun* desa. Desa Pakraman (DP) berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Untuk itu Bendesa atau yang dikenal dengan sebutan lain dengan persetujuan *krama* desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

¹⁵ I Wayan Wiryawan, Makalah (2012). Tanggungjawab Desa Pakraman dan Desa Dinas dalam Hubungannya dengan Investasi, tidak dipublikasikan.

Desa Pakraman menjadi obyek yang menarik. *Pertama*, desa Pakraman memiliki keunikan sekaligus kondisi paradoks, terlanjur mendapatkan ekspektasi tinggi, telah dikenal luas tetapi dihadapkan pada sejumlah kendala internal dan eksternal. *Kedua*, sebagai benteng terakhir dan pendukung utama budaya Bali, institusi informal desa. Komunitas adat, budaya yang bernafaskan Hindu. *Ketiga*, desa ini ditetapkan untuk memosisikan desa adat secara proporsional seiring penerapan otonomi di tingkat desa yang menimbulkan masalah yang semakin kompleks dalam sistem pemerintahan desa saat ini¹⁶.

Desa adat (Desa Pakraman) sebagai masyarakat hukum adat masih eksis sampai saat ini dan secara relatif dipandang mampu mempertahankan adat istiadat masyarakat dan nilai-nilai budaya Bali di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta arus globalisasi yang demikian pesat. Fungsi terpenting dari desa adat (pakraman) adalah menyelenggarakan kehidupan adat dan agama (adat Bali dan Agama Hindu) yang telah dianut secara turun temurun.

Dalam perkembangannya desa adat ini dilembagakan kedalam Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP). Kedua lembaga ini merupakan lembaga adat yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi Bali.

¹⁶ Ibid.



Lembaga ini didirikan untuk menjadi mediator/fasilitator masyarakat menyuarakan aspirasi adatnya.¹⁷

4. Ajeg Bali

Sebagai suatu kesatuan entitas, dikalangan masyarakat Bali ada semacam kekhawatiran akan terjadinya kelunturan budaya adiluhung yang mereka miliki. Ditengah terpaan arus modernisasi dan Globalisasi yang semakin masif, tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada budaya adiluhung akan tergerus yang pada akhirnya hilang ditelan zaman. Maka untuk menangkal arus perkembangan tersebut, sengaja ditiupkan sebuah eufemisme baru yang disebut dengan istilah “Ajeg Bali”.

Apabila dilacak, istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Pedande Made Gunung sekitar bulan Mei 2002 pada saat peresmian sebuah stasiun TV lokal di Denpasar. Esoknya sebuah koran harian yang masih satu group dengan TV Lokal yang baru diresmikan serta merta mengkampanyekan istilah ajeg Bali. Sejak itulah istilah ini berubah menjadi mantra wajib yang laah diucapkan atau ditulis oleh setiap manusia Bali, khususnya di kalangan petinggi daerah ini¹⁸.

Dalam berbagai telaah, tentang makna sesungguhnya dari

istilah ajeg Bali. Ajeg berarti tidak berubah, tetap. Istilah ini diambil dari kosa kata ajeg (bahasa Bali) yang berpadanan dengan kata jegeg, tuara obah, tuara seng, artinya tegak, tetap, teratur, tidak berubah. Dengan demikian, ajeg identik maknanya dengan kata lestari, pelestarian.

Kisah pemyarakatan istilah ajeg Bali mengingatkan kita terhadap istilah pelestarian budaya di masa orde baru. Nada bicara dan semangat dibalik kampanye ajeg Bali, ternyata tidak jauh berbeda dengan konsep “lestari”, yang di masa orde baru menjadi diktum, pernyataan resmi pemerintah atau bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan.

Istilah ajeg Bali dipakai sebagai bentuk keterpojukan dan ketidakberdayaan orang Bali dalam menghadapi arus deras globalisasi. Orang Bali merasa kalah bersaing dengan kaum pendatang yang lebih sukses, terhadap kekuatan kapital pariwisata yang semakin masif, dan terhadap jaringan teroris yang terus menebar amuk. Sebagai langkah cepat untuk membentengi diri maka dimunculkanlah istilah ajeg Bali.

Ajeg Bali juga pernah dimunculkan sebagai suatu gerakan perlawanan kepada pemerintah seperti yang terjadi semasa orde baru. Ajeg Bali dipakai sebagai antitesa dari perlakuan pemerintahan sentralistik yang dijalankan semasa rezim orde baru. Lewat

¹⁷ Bali Post, edisi sabtu, 17 Maret 2012.

¹⁸ Nyoman Sukma Arida, (2012). *Pandorra Bali; Refleksi di Balik Gemerlapnya Turisme*, Denpasar; Pustaka Larasan



trigger factorynya otonomi daerah, sekarang identitas politik lokal ini bergerak disepanjang garis etnik, agama, budaya yang menuntut pengakuan akan identitas, hak hukum dan klaim historis (Kymlicka dan Baogang, 2005;3).

C. Basis Sosial dan Agama di Bali

Secara etnis dan geografis, Bali memiliki masyarakat yang sangat majemuk dan plural. Hal itu disebabkan derasnya arus imigran luar yang memasuki Bali sebagai destinasi kehidupan bagi masyarakat luar Bali.

Sebagai dampak keterbukaan tersebut, daerah ini sempat diguncang ledakan bom yang berskala besar yang sekaligus mempunyai daya penghancur besar. Daerah ini sebelum diguncang oleh dua kali bom yang terjadi pada tahun 12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005 sempat menjadi ikon demokrasi Indonesia di mata internasional¹⁹.

Tragedi beruntun itu sempat mengakibatkan gejolak yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan bersama di dalam masyarakat. Tragedi ini sempat memunculkan kekhawatiran akan kembali bangkitnya politik identitas yang mencuat dalam praktek “ajeg Bali” yang berlebihan. Munculnya identitas politik “ajeg Bali” ini bisa berpotensi mengancam keragaman identitas (agama, etnis, budaya). Kekhawatiran ini cukup beralasan karena praktek ini sebelumnya

sudah berkembang dalam masyarakat Bali²⁰.

Namun, kearifan lokal masyarakat Bali dapat menangkal kekhawatiran tersebut. Hal ini tampak ketika pelaksanaan upacara khusus *peमारिसуда Karipubaya* yang bermakna penyucian alam semesta pasca tragedi tersebut. Masyarakat Bali dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan aksi ‘balas dendam’ dengan kekerasan, tetapi justru menempuh pendekatan spiritual yang secara simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan dan toleransi yang menembus batas-batas ras, negara, etnik, agama, dan telah mendapatkan empati dan simpati masyarakat lokal, nasional dan dunia (Geriya, 2003;1). Kearifan lokal ini merupakan modal sosial, modal religius-kultural, modal rohani-batiniah untuk aksi pemulihan pasca tragedi bom²¹.

Selain itu, dikalangan masyarakat Bali pada lapisan elit/strata atas hampir tidak mempermasalahkan aksi kekerasan itu. Hal tersebut karena sensifitas kesadaran kelompok-kelompok agama yang berbeda di Bali yang terhimpun dalam forum komunikasi beragama menjaga agar peristiwa tersebut tidak bergeser kearah isu konflik antar beragama.

Bali mempunyai komunitas-komunitas masyarakat yang secara lokal dapat dibedakan berdasarkan basis keagamaan. Basis ini didasari faktor imigran (para pendatang) dari luar Bali. Rasanya menjejaki terbentuknya masyarakat di Bali tidak terlepas dari

¹⁹ I Wayan Gede Suacana, Jurnal Kajian Bali (2011). Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa Bali, Denpasar; Universitas Udayana

²⁰ I Made Arsana Dwiputra, (2012), Ajeg Bali dan tantangan terhadap keragaman di Bali

²¹ I Wayan Gede Suacana, Jurnal Kajian Bali (2011). Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa Bali, Denpasar; Universitas Udayana



kehadiran para pendatang ini. Umumnya mereka berasal dari berbagai suku yang berasal dari luar pulau Bali. Pendatang biasanya membentuk komunitas atau perkampungan-perkampungan yang berdasarkan suku dan agama. Hal ini terbukti dengan adanya perkampungan-perkampungan yang berasal dari beberapa etnis seperti; Bugis, Jawa, sulawesi dan Cina.

Di Bali komunitas atau perkampungan-perkampungan yang berbasis suku agama itu dapat dilihat mulai dari kampung Loloan Jembrana, Kampung Pegayaman di Buleleng, kampung Saren Jawa di Karangasem, kampung Kusamba di Klungkung, Kampung Kapaon di Denpasar²².

Dari komunitas-komunitas tersebut telah memperlihatkan bagaimana akulturasi budaya antar agama, etnis, budaya yakni agama Hindu dan Islam serta Bali, Jawa, Madura, Bugis, Melayu di level etnisitas. Demikian pula komunitas Kristen dan Katolik di Tuka dan Untal-untal, Kuta Utara serta Palasari, Jembrana, serta komunitas Siwa-Budha di Karangasem ataupun komunitas Chinese-Budha dan Chinese Konghucu yang bisa hidup berdampingan di Bali. Dalam akulturasi tadi menciptakan nilai-nilai karakter Bangsa dan aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat Bali.

Seperti yang dikenal, masyarakat Bali memiliki semangat toleransi yang amat tinggi. Terjadinya pemisahan wilayah secara spasial berdasarkan agama tidak menimbulkan konflik yang berarti dikalangan masyarakat Bali secara umum. Semangat toleransi itu seperti banyak

terlihat pada masyarakat pantai dan masyarakat perkotaan.

Pada masyarakat pantai, seperti yang diperlihatkan daerah Klungkung antara penduduk Hindu yang dominan dengan warga Islam dan Cina sudah sejak zaman kerajaan Klungkung hidup berdampingan kerjasama, hormat menghormati serta rukun. Selain Cina hidup pula berdampingan dari etnis lainnya terutama Bugis dan Jawa yang beragam Islam mereka secara administratif pemerintahan terhimpun dalam sebuah komunitas setingkat desa yang disebut kampung Islam Kusamba. Di sana nampak sekali aktifitas toleran ini ada dalam perayaan hari-hari besar agama.

Umat Hindu di Kusamba setiap tahun melaksanakan upacara syukur (*yadna*), yaitu upacara *Nyepi segara* yang jatuh pada hari bulan penuh (purnama) pada sasih Kalima (Oktober-November). Selama Nyepi Segara warga Islam pun ikut menghormatinya. Demikian pula saat-saat upacara agama Islam seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul adha, Nyapara Umat Hindu Kusamba ikut menikmatinya. Kehidupan toleran antar umat Hindu dan umat Islam terjaga. Setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan bendesa adat dan perbekel desa Kusamba selalu berkoordinasi dan menginformasikannya kepada aparat desa di kampung Kusamba.

Di Kabupaten ini ada sebuah desa yang disebut desa Gelgel penduduknya terdiri atas etnis Bali, Jawa dan Bugis. Agama yang ada agama Hindu, Islam, Kristen, Budha dan Khatolik. Hubungan antar etnis dan antar agama ini cukup bagus.

Pada masyarakat perkotaan konfigurasi masyarakat Bali sangat mencolok deferensiasinya. Masyarakat

²² I Made Arsana Dwiputra, *ajeg Bali dan tantangan terhadap keragaman etnis di Bali*, dalam suatu Makalah, tidak terpublikasi.



Bali perkotaan terdeferensiasi berdasarkan asal usul masyarakat yang datang dari berbagai etnis (suku bangsa) di Indonesia masuk ke Bali. Defereinsiasi seperti itu, sebagaimana terdapat di kelurahan Loloan Barat kabupaten Jembrana.

Sejarah Kelurahan yang berubah menjadi kota ini, terkait erat dengan sejarah perkembangan agama Islam di Kabupaten Jembrana. Kedatangan orang-orang Bugis sejak abad ke 17 di daerah Jembrana, boleh dikatakan menjadi awal masuknya Islam di kawasan itu.

Di Jembrana orang-orang ini (Bugis) mampu membangun hubungan baik dengan penguasa Jembrana (I Gusti Ngurah Pancoran). Keahlian orang Bugis dalam berlayar, berdagang dan strategi dalam militer tampaknya menjadi daya tarik yang memungkinkan mereka diterima dengan baik oleh penguasa Jembrana pada waktu itu.

Kontak perdagangan dengan dunia luar yang semakin luas, pada gilirannya membuka Jembrana sebagai tempat masuknya migran yang berasal dari Jawa dan daerah Melayu, Cina, Madura, Sasak Lombok.

Dalam hal interaksi diantara kelompok-kelompok etnis ini, mereka saling menghargai. Orang Bali menyebut orang-orang muslim sebagai *nyama kampung*, sedangkan orang muslim menyebut orang Bali dengan orang Bali. Hubungan antar umat beragama yang sangat baik ini, juga terpeliharakan dalam filosofi yang paling terkenal yang disebut *Tatwam Asih*. Dalam *Tatwam Asih* ini tercermin bahwa cintailah orang lain sama dengan mencintai diri kamu sendiri,

sayangilah orang lain seperti menyangi dirimu sendiri²³.

Dalam masyarakat yang bercampur (multikultur), seperti di Kusamba Kabupaten Klungkung (daerah pantai) dan Kampung Lolan Barat Kabupaten Jembrana (daerah perkotaan) tampaknya nilai-nilai kearifan tersebut diatas dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Mereka memang berbeda suku dan agama, tetapi dalam kenyataan hidup mereka sesungguhnya telah menerapkan nilai-nilai atau *tattwa samana/samanya dharma*, nilai kebaikan dan kebenaran yang mereka dapat maknai secara bersama-sama.

III. KESIMPULAN

Tidak dipungkiri kehadiran pariwisata di Bali telah menimbulkan suasana yang paradoks. Disatu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya telah meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Bali, akan tetapi di sisi lain munculnya pariwisata telah menunjukkan kehancuran budaya dan perilaku dan jati diri manusia Bali yang tidak bisa dihindarkan. Paradoks ini diperparah dengan hadirnya rezim yang memerintah baik dari pusat maupun di daerah.

Maka tidak mengherankan kondisi Bali saat ini terlihat sangat kompleks. Ditengah-tengah kekompleksan tersebut satu kearifan lokal yang melekat dalam masyarakat Bali adalah konsep yang sangat suci dan adiluhung yakni *Tri Hita Karana*, tiga penyebab kesejahteraan dalam kepercayaan Hindu Bali. Konsep keseimbangan kesejahteraan ini menganut

²³ I Ketut Ardana dkk, (2011), *Masyarakat Multikultural Bali; tinjauan sejarah, Migrasi, dan Integrasi*, Denpasar; kerjasama Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan



filosof hidup masyarakat yang terdiri dari *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. Ketiga komponen tersebut harus diimplementasikan sebagai satu kesatuan yang manunggal untuk mencapai kebahagiaan.

Ketiga komponen tersebut, *Parhyangan*, berarti hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan atau *Ida Shanghyang Widhi Wasa*, *Pawongan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Sementara *Palemahan*, adalah hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Kompleksnya pembangunan pariwisata beserta dampaknya sebaiknya diatasi dengan tiga konsep keseimbangan hidup tersebut diatas. Tindakan konkrit pemerintah yang telah merumuskan visi misi kepariwisataan Bali sebaiknya perlu didukung. Visi misi tersebut adalah terwujudnya pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan mempunyai daya saing menuju Bali Mandara berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Demikian pula merawat dan melestarikan Budaya Bali yang sifatnya unik ini. Ketiga konsep tersebut diatas, jika diimplementasikan dengan secara sungguh-sungguh akan dapat menjaga nilai-nilai lokal yang ada dalam kultur masyarakat Bali.

Karena sebagaimana diketahui, orang Bali memiliki desa adat yang sering disebut 'desa pakraman' sebagai suatu kesatuan tiga unsur pendukung yaitu *Tri Hita Karana*, terdiri dari *Parhyangan* yaitu pusat pemujaan yang dimiliki oleh setiap desa adat, *pawongan* adalah mencakup semua warga yang bermukim di desa adat, dan *palemahan* adalah pemukiman yang merupakan tanah ayahan desa atau tanah desa.

Satu catatan serius yang dianut dalam masyarakat Bali dalam memelihara tradisinya seperti tercermin dalam konsep tata ruang Budaya Bali yang menggariskan suatu mekanisme bahwa sebelum memulai membangun sebuah rumah, sebidang tanah dibagi menjadi tiga bagian (*trimandala*), yakni *utama Mandala*, *madya mandala*, dan *nista Mandala*. Tiga bagian ini mencerminkan praktek *Tri Hita Karana* sangat melekat dalam masyarakat Bali.

Secara budaya bangunan dan fungsi bangunan serta nilai yang terkandung dalam masing-masing bagian itu adalah berbeda-beda. Pada bagian bernilai utama (*utama mandala*) adalah ruang yang dianggap suci dan berfungsi sebagai tempat untuk membangun kuil keluarga (wujud fisik parhyangan). Pada bagian ditengah-tengah dengan nilai sedang/*madya (masya Madya mandala)* adalah sebagai tempat untuk membangun rumah tempat tinggal. Sedangkan pada bagian yang bernilai *nista (nista mandala)* adalah tempat yang dipandang profan dan berfungsi sebagai tempat untuk membangun dapur dan kamar mandi dan bangunan-bangunan lainnya. Tiga ruang konsep tata ruang tersebut lazim ditemukan dalam praktek kultur masyarakat Bali dalam membangun rumah dalam komunitasnya.

REFERENSI

Ardana. I Ketut, dkk. (2011), *Masyarakat Multikultural Bali; Tinjauan Sejarah, Migrasi, dan Integrasi*, Denpasar; kerjasama Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.

_____, (2012). *Pandora Bali: Refleksi dibalik Gemerlap Turisme*, Denpasar; Pustaka Larasan.



- Arida, (2009). I Nyoman Sukma *Meretas Jalan Ekowisata Bali; Proses Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali*, Denpasar; Udayana University Press.
- Astiti. Tjok Istri Putra, (2010). *Desa Adat Menggugat dan Digugat*, Denpasar; Udayana University Press.
- Baiquni, M. dkk, (2010). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global* Denpasar; Udayana University press.
- Dwiputra, I Made Arsana (2012). *Ajag Bali dan Tantangan terhadap Keragaman di Bali*, Makalah Tidak terpublikasi.
- Nordholt. Henk Schulte, (2010), *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*, Denpasar; Pustaka Larasan.
- Madiun. N, (2010). *Nusa dua model Pengembangan kawasan wisata Moder*, Denpasar; Udayana University Press.
- Parimarta, I Gde. (2011). *Nilai Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat Bali*, Denpasar; Kementerian kebudayaan dan pariwisata RI dan Udayana University press.
- Suarsana, I. Nyoman (2011). Pustaka; Jurnal Jurnal Ilmu Budaya, Udayana University Press.
- Suacana, I Wayan Gede, (2011). *Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa Bali*, Denpasar; Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana
- Widiarteja. I.G.N Parikesit, (2011). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi, Konsep Ragam Masalah dan Alternatif Solusi*, Denpasar; Udayana University Press.
- Windia. Wayan P, (2008). *Bali Mawacara ; Kesatuan Awig-awig Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Denpasar; Udayana University press
1. Pustaka; Jurnal Jurnal Ilmu Budaya, Volume XI, Nomor 2 edisi Agustus 2011. Denpasar: Udayana University Press
 2. Jurnal Kajian Budaya, Volume 3 nomor 6 edisi Juli 2006, Denpasar; Kajian Budaya Universitas Udayana
 3. Jurnal Kajian Bali, Volume 1, Nomor 1, Edisi April 2011, Denpasar Kajian Budaya Universitas Udayana.
 4. Makalah; Ajeg Bali & Tantangan Keragaman Bali, (2006). Tidak terpublikasi
 5. Makalah; Tanggungjawab Desa Pakraman dan Desa Dinas dalam Hubungannya dengan Investasi, (2012). Tidak terpublikasikan.
 6. Makalah : Santun Berinvestasi di Wilayah Desa Pakraman Bali, (2012) tidak dipublikasikan.

Surat Kabar;

Bali Post media, edisi sabtu, 17 Maret 2012.

Jurnal/makalah;